

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN)

oleh:

Ahmad Rayhan,¹ Andy Omara²

INTISARI

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis (1) latar belakang pembentukan Peraturan Daerah bernuansa agama di Kota Tasikmalaya (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014) dan di Kabupaten Bekasi (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016), (2) reaksi masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah bernuansa agama di Kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Bekasi, (3) eksistensi peraturan daerah bernuansa agama di Kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Bekasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah bernuansa agama di Kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Bekasi, karena kedua daerah tersebut memiliki (1) Demografi penduduk dengan mayoritas muslim, (2) Sejarah yang penuh nilai perjuangan dan nilai-nilai keagamaan, (3) Visi dan Misi yang agamis, (4) penurunan moral dan munculnya penyakit masyarakat, (5) anggapan bahwa nilai-nilai agama dalam peraturan daerah dapat menanggulangi demoralisasi tersebut. Reaksi yang muncul dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah bernuansa agama Kota Tasikmalaya adalah mendukung terlaksananya peraturan tersebut, sementara reaksi masyarakat di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 2 (dua), masyarakat muslim mendukung Peraturan Daerah tersebut, dan pengusaha tempat hiburan malam menolak Peraturan Daerah tersebut dan mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung, dan diputus dengan putusan “tidak diterima” dan “ditolak”.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah bernuansa agama di Kota Tasikmalaya dan di Kabupaten Bekasi legal dan sesuai dengan sistem perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Agama, Sistem Perundang-undangan di Indonesia.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (ahmadrayhan30@gmail.com).

² Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (andy.omara@mail.ugm.ac.id).

**THE EXISTENCE OF RELIGIOUS VALUES BASED REGIONAL
REGULATIONS IN THE INDONESIAN LEGISLATION SYSTEM (STUDY OF
REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY NO 7 OF 2014
CONCERNING VALUES OF RELIGIOUS LIVE IN TASIKMALAYA CITY
AND REGIONAL REGULATION IN BEKASI REGENCY NO 3 OF 2016
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF TOURISM)**

By:
Ahmad Rayhan,³ Andy Omara⁴

ABSTRACT

This research is aimed to discuss about (1) the background for the establishment of religious regulation in Tasikmalaya city (Regional Regulation No 7 of 2014) and Bekasi Regency (Regional Regulation No 3 of 2016), (2) community reaction, local government, and the central government to the establishment of religious regulations in Tasikmalaya city and Bekasi Regency, (3) the existence of religious regulation in Tasikmalaya city and Bekasi Regency in the legislation system in Indonesia.

This research was normative research. Normative research was carried out by library research by using the secondary data in the form of primary legal material, the secondary legal material, and the tertiary legal material with the documentation method and it was using tools in the form of document studies.

The data was analyzed by using qualitative analysis. Based on the results of the analysis, the author found that the background of the establishment of religious regulation of Regional Regulations in Tasikmalaya city and Bekasi Regency caused by the two regions have (1) Demographics of the population with a Muslim majority, (2) The history that was full of values of struggle and religious values, (3) Religious vision and mission, (4) moral decline and the emergence of community diseases, (5) the assumption that religious values in regional regulations can overcome the demoralization.

The reaction of the community to the Regional Regulations with the religious regulation of the Tasikmalaya city was support the implementation of the regulation, while the public reaction in Bekasi Regency is divided into 2 reaction, Muslim community supported the rules of the regional regulation, and businessmen of nightclubs rejected the Regional Regulation and submitted judicial review to the Supreme Court, and decided with a "did not accepted" and "rejected" decision.

Based on the results it can be concluded that Regional regulations with religious regulation in Tasikmalaya city and Bekasi Regency were legal and in accordance with the system of legislation in Indonesia.

Keywords: Regional Regulations, Religion, Legislation System in Indonesia

³ Student, Master of State law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (ahmadrayhan30@gmail.com).

⁴ Lecture, Faculty of Law. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., (andy.omara@mail.ugm.ac.id).